

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap pemerintah daerah ataupun negara selalu berusaha untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerahnya. Pembangunan ekonomi merupakan upaya yang dilakukan secara terus menerus dalam mengolah sumber daya yang tersedia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang (Frisdiantara dan Mukhlis, 2018). Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah salah satunya dapat diketahui dari pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.

Menurut Prof. Simon Kuznet pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kesanggupan suatu negara dalam memberikan berbagai macam barang modal terhadap masyarakatnya dalam jangka panjang, kemampuan tersebut berkembang berdasarkan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang dibutuhkan (Jhingan, 2018). Dalam pengertian lain pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara terus-menerus menuju kondisi yang lebih baik selama periode tertentu.

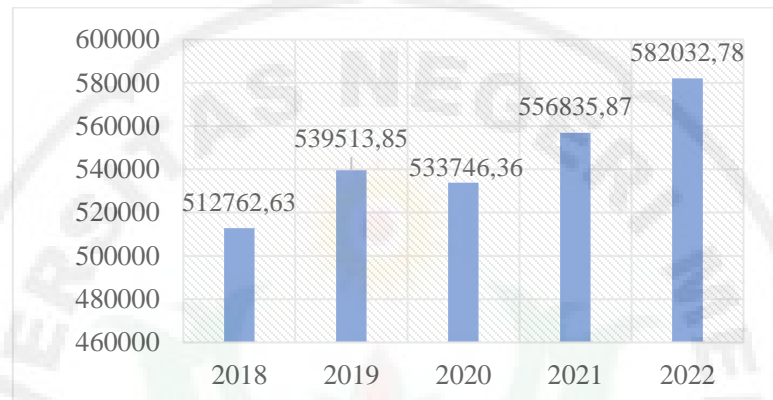
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memperlihatkan kondisi perekonomian yang semakin baik dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Sebaliknya semakin rendah pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menunjukkan kondisi perekonomian

menurun dan tingkat kesejahteraan juga ikut menurun. Oleh sebab itu tingkat pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk perekonomian karena menjadi indikator yang akan menentukan arah kebijakan yang akan dilakukan selanjutnya.

Pertumbuhan ekonomi dan proses kenaikan produksi barang/jasa pada aktivitas ekonomi masyarakat erat kaitannya. Menurut BPS Sumatera Utara (2022), dalam mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dapat menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikatornya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (regional) tertentu pada saat tertentu tanpa memperhatikan faktor kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan dari suatu tahun terhadap tahun sebelumnya yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa di suatu wilayah. Nilai Produk Domestik Regional Bruto menunjukkan apakah daerah tersebut mengalami kemajuan perekonomian atau tidak. Oleh sebab itu tinggi rendahnya produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan menjadi acuan suatu daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi yang terdapat di Indonesia yang terdiri dari 33 Kabupaten/Kota, pada saat ini juga selalu mengupayakan kesuksesan pembangunan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan ekonominya. Adapun kondisi perekonomian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 sampai 2022 berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan jumlah PDRB Atas Dasar Harga Konstan yaitu sebagai berikut.

Gambar 1.1
Grafik PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022.



Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara

Berdasarkan data tahun 2018-2022 PDRB Provinsi Sumatera Utara pada umumnya mengalami peningkatan kecuali di tahun 2020. Adapun jumlah PDRB tertinggi berada pada tahun 2022 yaitu 582032.78 miliar rupiah. Sedangkan jumlah PDRB terendah berada pada tahun 2018 yaitu dengan jumlah 512762,63 miliar rupiah. Apabila dilihat pada tahun 2020, jumlah PDRB Provinsi Sumatera utara mengalami penurunan yang cukup pesat yaitu turun sebesar 5767,49 miliar rupiah dari pencapaian tahun 2019. Pada tahun 2021 dan 2022 PDRB Sumatera Utara mengalami peningkatan namun secara umum secara umum kinerja ekonomi tahun 2021 dan 2022 menunjukkan pergerakan melambat dibandingkan tahun 2018. Adanya penurunan dan perlambatan tingkat PDRB tersebut di akibatkan karena penyebaran covid-19 yang menyebabkan kurangnya pergerakan perekonomian dalam masyarakat (BPS Sumatera Utara, 2022).

Berdasarkan data BPS Sumatera Utara, terdapat perbedaan jumlah produk domestik regional bruto antar Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara. Seperti halnya

di tahun 2022, PDRB tertinggi terdapat pada Kota Medan yaitu sebesar 165120.01 miliar Rupiah. Sedangkan jumlah PDRB terendah yaitu berada pada Kabupaten Pakpak Barat yaitu dengan jumlah 909.62 miliar Rupiah. Besarnya ketimpangan PDRB antar Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara memperlihatkan bahwa terdapat wilayah yang memiliki kinerja perekonomian yang kurang maksimal sehingga mempengaruhi jumlah PDRB Sumatera Utara.

Kemudian apabila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang terdapat di Indonesia jumlah PDRB Sumatera Utara menempati urutan kelima dengan jumlah PDRB tertinggi sepanjang tahun 2018-2022, berada di bawah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan DKI Jakarta. Namun meskipun Provinsi Sumatera Utara menempati urutan ke lima dengan jumlah PDRB tertinggi di Indonesia, jumlah PDRB Sumatera Utara memiliki perbedaan yang cukup tinggi dibandingkan dengan empat provinsi di atasnya. Seperti halnya ditahun 2018 Jawa Tengah memiliki jumlah PDRB sebesar 893750.3 miliar rupiah sedangkan Provinsi Sumatera Utara memiliki jumlah PDRB sebesar 487531.23 miliar Rupiah. Sehingga hal tersebut memperlihatkan bahwa PDRB di Sumatera Utara belum cukup baik sehingga diperlukan upaya untuk peningkatan PDRB Sumatera Utara.

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDRB) terdapat beberapa faktor – faktor atau komponen-komponen pokok yang sangat penting yaitu meliputi, akumulasi modal, Pertumbuhan penduduk yang juga meliputi pertumbuhan dalam angkatan kerja, kemajuan-kemajuan dibidang teknologi (Todaro, 1995). Menurut teori Neo-Klasik yang dikembangkan oleh Sollow-Swan, pertumbuhan ekonomi

dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi. Dalam hal ini laju pertumbuhan ekonomi dapat tercapai tergantung pada perkembangan teknologi, tenaga kerja dan modal (Sukirno, 2016).

Menurut Mankiw (2001) infrastruktur yaitu wujud modal publik yang mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, irigasi, bangunan, dan fasilitas publik lainnya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia di berbagai bidang ekonomi dan sosial. Salah satu bentuk infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan dalam perekonomian adalah infrastruktur jalan. Jalan didefinisikan sebagai prasarana transportasi darat yang dibutuhkan dalam meningkatkan mobilitas masyarakat.

Berdasarkan penelitian Warsilan dan Noor (2015) yang berjudul “Peranan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasi pada Kebijakan Pembangunan di Kota Samarinda” menunjukkan bahwa infrastruktur jalan memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto Samarinda. Peranan infrastruktur jalan dalam perekonomian yaitu mempermudah distribusi faktor produksi barang dan jasa. Selain itu, peningkatan ketersediaan jalan akan membuka akses satu daerah ke daerah lainnya sehingga daerah-daerah yang terisolasi semakin berkurang dan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Adapun perkembangan panjang jalan pada Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2022 yaitu sebagai berikut.

Gambar 1.2
Grafik Total Panjang Jalan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022

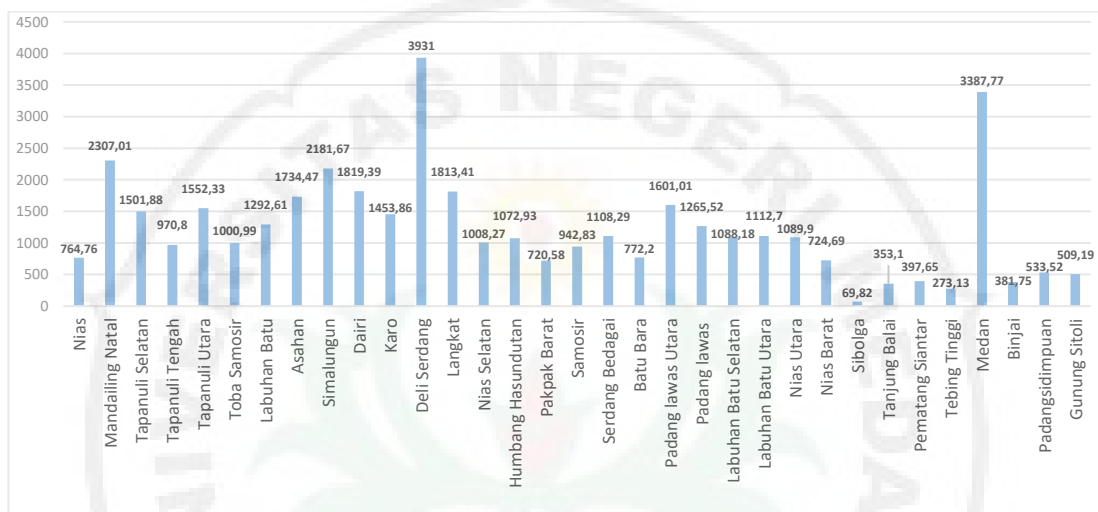


Sumber: BPS Sumatera Utara (data diolah)

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa panjang jalan yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara sepanjang tahun 2018 – 2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 panjang jalan di Provinsi Sumatera Utara 40.369,43 kilometer dan pada tahun 2019 panjang jalan di Provinsi Sumatera Utara tidak mengalami pertambahan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 panjang jalan Sumatera Utara kembali mengalami peningkatan menjadi 40.737,18 km dan di tahun 2022 meningkat menjadi 40.737,21 Km.

THE
Character Building
UNIVERSITY

Gambar 1.3
Grafik PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2022.



Sumber: BPS Sumatera Utara (data diolah)

Apabila dilihat dari grafik panjang jalan yang terdapat pada Kabupaten dan Kota yang terdapat pada Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 maka diketahui bahwa infrastruktur jalan terendah berada pada Kabupaten Sibolga yaitu dengan panjang jalan 69,82 Km. Sedangkan panjang jalan tertinggi berada pada Kabupaten Deli Serdang dengan panjang jalan yaitu 3931 Km, kemudian disusul Kota Medan dengan Panjang jalan 3887,77 Km. Berdasarkan data panjang jalan Kabupaten/Kota tahun 2022 tersebut dapat diketahui bahwa infrastruktur jalan masih berpusat pada Kota-Kota besar. Adanya ketimpangan pembangunan jalan ini dapat mempengaruhi aktivitas perekonomian di beberapa daerah menjadi kurang optimal. Sehingga membuat jumlah PDRB pada kabupaten/Kota mengalami ketimpangan yang tentunya berdampak pada jumlah PDRB Sumatera Utara.

Selain infrastruktur faktor lain yang mempengaruhi peningkatan PDRB adalah kuantitas dan kualitas tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan penduduk yang masuk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh masyarakat dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang maupun jasa jika terdapat permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut (Mulyadi, 2017).

Menurut Todaro (1995) pertumbuhan penduduk yang juga akan mengakibatkan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai faktor positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebutkan apabila angkatan kerja semakin banyak maka tenaga kerja produktif akan semakin banyak pula, peningkatan penduduk yang semakin besar dapat memperluas pasar dalam negeri. Adapun perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut.

Gambar 1.4
Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022.



Sumber: BPS Sumatera Utara (data diolah)

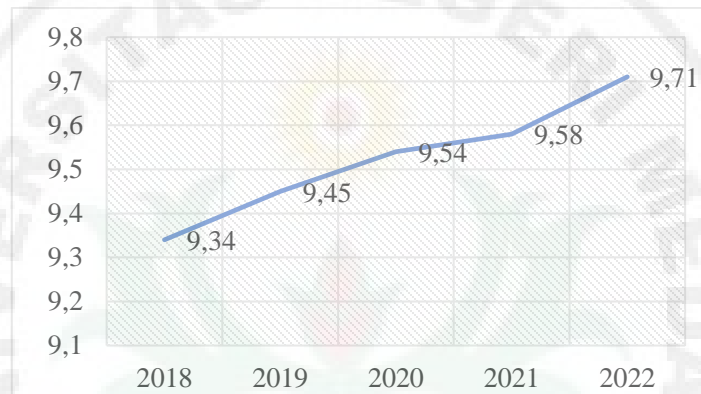
Berdasarkan grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Sumatera Utara sepanjang tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Adapun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu dengan tingkat 71.82 persen. Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terendah terdapat pada tahun 2020 yaitu 68.67%.

Apabila dibandingkan dengan PDRB Sumatera Utara, pada saat TPAK mengalami penurunan di tahun 2019 PDRB Sumatera Utara justru mengalami peningkatan. Begitu juga ditahun 2020 pada saat angkatan kerja Sumatera Utara meningkat, PDRB Sumatera Utara justru mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena kurang permintaan tenaga kerja yang mengakibatkan banyaknya pengangguran sehingga membuat tingkat PDRB tidak bertumbuh dengan baik (BPS Sumatera Utara 2022).

Dalam hal meningkatkan PDRB selain kuantitas tenaga kerja kualitas dari tenaga kerja sebagai faktor produksi akan sangat mempengaruhi. Menurut Sukirno (2016) tersedianya modal belum cukup untuk memodernkan suatu perekonomian. Seperti dalam melaksanakan proyek-proyek pembangunan maka diperlukan tenaga kerja terdidik atau tenaga kerja yang memiliki ahli teknik di berbagai bidang, akuntan, dan manajer. Oleh karena itu tenaga kerja seperti ini memerlukan pendidikan. Dengan demikian, dalam menjalankan pembangunan ekonomi maka langkah yang diperlukan yaitu peningkatan sistem pendidikan. Menurut BPS Sumatera Utara, untuk mengetahui tingkat pendidikan suatu wilayah dapat dilihat berdasarkan rata-rata lama sekolah.

Adapun perkembangan rata-rata lama sekolah di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 sampai dengan 2022 yaitu sebagai berikut.

Gambar 1.5
Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Sumatera Utara (data diolah)

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata lama sekolah pada Provinsi Sumatera Utara terlihat membaik sepanjang tahun 2018-2022. Rata-rata lama sekolah di Sumatera Utara mengalami kenaikan , dimana pada tahun 2018 yaitu sebesar 9,34 kemudian terus meningkat sampai dengan tahun 2022 menjadi 9,71.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistika Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera utara yaitu sebesar 9.71. Jika dilihat dari Kabupaten/Kota, ditahun 2022 wilayah yang memiliki jumlah rata-rata sekolah tertinggi berada pada Kota Medan yaitu sebesar 11.5. Sedangkan wilayah dengan jumlah rata-rata sekolah terendah berada pada Kabupaten Nias dan Nias Selatan dengan jumlah rata-rata 5,88 dan 6,23. Adanya perbedaan rata-rata lama sekolah Kabupaten dan Kota yang berada pada Provinsi Sumatera Utara menunjukkan belum meratanya tingkat pendidikan antar daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Sehingga ketimpangan tersebut dapat membuat kurang optimalnya produktivitas masyarakat di beberapa daerah karena rendahnya kualitas tenaga kerja yang dimiliki.

Berdasarkan penjelasan diatas, infrastruktur jalan dan tingkat pendidikan pada Kabupaten dan Kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara masih belum merata sehingga menjadi penghambat dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Selain itu adanya peningkatan angkatan kerja di beberapa tahun tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Sehingga berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengaruh Infrastruktur Jalan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pendidikan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara”**, untuk menganalisis seberapa jauh infrastruktur jalan, TPAK dan tingkat pendidikan mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara.

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:

1. Produk Domestik Regional Bruto yang terdapat pada Provinsi Sumatera Utara belum cukup baik, hal ini terlihat pada tahun 2020 jumlah PDRB mengalami penurunan yang cukup pesat dan pada tahun 2021-2022 mengalami peningkatan yang cukup lambat. Selain itu terdapat ketimpangan jumlah PDRB Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara.

2. Ketersediaan infrastruktur jalan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera masih didominasi di perkotaan, sehingga adanya ketimpangan jalan ini dapat mempengaruhi jumlah PDRB.
3. Tingkat pendidikan yang dilihat dari rata-rata lama sekolah di Kabupaten dan Kota yang berada pada Provinsi Sumatera Utara mengalami ketimpangan.
4. Terjadi penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja namun jumlah PDRB mengalami peningkatan sehingga tidak sesuai dengan teori.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada:

1. Pengaruh Infrastruktur jalan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Tingkat pendidikan terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara.
2. Data penelitian menggunakan data Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2018-2022

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah yang dikemukakan, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah infrastruktur jalan berpengaruh terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara?

2. Apakah tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara?
4. Apakah infrastruktur jalan, tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pendidikan secara simultan berpengaruh terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka dapat ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh infrastruktur jalan terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara.
4. Untuk mengetahui pengaruh infrastruktur jalan, tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pendidikan terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini yaitu untuk dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca yang memiliki kepentingan khususnya pada lingkungan perguruan tinggi. Serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penelitian berikutnya khususnya yang memiliki keterkaitan dengan pengaruh infrastruktur jalan, tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pendidikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

1.6.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat untuk penulis

Penelitian ini sebagai pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan menerapkan ilmu ataupun teori yang penulis dapatkan selama perkuliahan serta syarat untuk menyelesaikan pendidikan yang penulis tempuh.

2. Manfaat untuk pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai bahan masukan dalam membuat kebijakan dan pengambil keputusan dalam pengelolaan pembangunan wilayah serta upaya dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto.